

GENEOLOGI TERORISME: OTOKRITIK FILOSOFI TERHADAP KETIMPANGAN PRIMORDIAL & KONSTRUKSI WACANA RADIKALISME

Elkata Agustinus Batistuta Atua
elkaatua123@gmail.com
Universitas Kristen Indonesia

ABSTRAK

Memaknai terorisme sebagai gejala epistemik yang berakar pada rekonstruksi primordialitas yang cacat tidaklah tepat bila hanya di pandang sebagai fenomena sosiologis atau determinisme ontologis. Dalam Studi Geneologi, radikalisme juga membawa makna serupa layaknya akses dari rezim tafsir yang mereduksi pluralitas makna. Dengan membedah aspek Geneologis ala Nietzsche, penelitian ini akan menggugat modus produksi terorisme & konstruksi radikalisme sebagai fasilitas evolusi diskursif yang membelenggu rasionalitas komunal. Jika menilik aspek historis, maka pemaknaan terorisme sebagai ekspresi ideologis tidak sepenuhnya dapat keliru namun ia juga beroperasi dengan kooptasi struktural dan simbolik. Penelitian ini meninjau kembali transformasi dari radikalisme sebagai hasil konstruksi seiring dengan munculnya kekuasaan yang hegemonik. Melacak jejak epistemik dengan metode hermeneutik kritis untuk membongkar anatomi dan realita ketimpangan primordial ini. Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa terorisme adalah artikulasi krisis eksistensial yang terfasilitasi oleh asimetri interpretasi dan politisasi identitas. Bukan hanya sebagai alur panjang tentang ekstrimisme, namun penerkaan terhadap naluri kekuasaan yang mengorganisir kebengisan.

Kata Kunci: Geneologi, Terorisme, Radikalisme, Primordialitas, Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Pandangan definitif mengenai Terorisme seringkali dimaknai sebagai perilaku ekstrimisme yang dilakukan akibat fanatisme ideologis atau fundamentalisme politik dan agama. Nyatanya, pemahaman ini mereduksi kebenaran yang memahat realitas politik dan legitimasi sosial untuk menghiraukan aspek kompleksitas dari relasi kuasa. Studi geneologi mengenai terorismeewartakan adanya evolusi kekuasaan bukan hanya sebagai bentuk resistensi kepada hegemoni, namun mekanisme kekuasaan itu sendiri. Sebagai aktor dominan, negara seringkali merangkai definisi terorisme sesuai keinginan dan kepentingannya sendiri. Sehingga bersua pada dikotomi antara kekerasan yang ditik benar & apa yang dikategorikan salah. Sehingga tuntutan fundamental untuk membongkar wacana arus utama dalam pendekatan geneologi sebenarnya hadir untuk menegaskan makna terkait realita sejarah yang penuh pergeseran makna dan tidak linier. Sehingga radikalisme harus mulai dipandang sebagai kooptasi simbolik yang menentukan identitas tertentu sebagai musuh yang sah untuk diperangi.

Dalam filsafat politik, kekerasan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari struktur sosial. Terminologi Thomas Hobbes sebagai kodrati manusia disebut *homo homini lupus*, Nietzsche memandang kekerasan sebagai kesatuan dari bagian produksi makna dalam relasi kuasa. Sejarah menegaskan bahwa kekerasan sering disangkutkan dengan primordialisme, sebuah keyakinan akan superioritas identitas suatu kelompok yang dipakai untuk melegitimasi dominasi dan eksklusi sosial. Maknailah kenyataan bahwa radikalisme bukanlah penyimpangan, namun respons bagi kondisi ketimpangan yang sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk melanggengkan bahkan mengawetkan kekuasaan.

Dalil mengenai ketimpangan primordial akan berlaku apabila suatu kelompok menganggap identitas yang melekat pada mereka terancam oleh struktur kekuasaan yang lebih besar. Victimhood inilah yang kerap kali dikonstruksi untuk memanipulasi lewat narasi historis dan propaganda publik, terutama bagi kalangan heterogen dimana isu etnis dan agama menjadi pemicu konflik. Eksklusifitas politik identitas diperalat sebagai fasilitas mobilisasi untuk mengasuh tumbuhnya ideologi radikal. Sehingga radikalisme tidak bertumbuh dalam kevakuman namun karena konstruksi naratif untuk membentuk pola pikir masyarakat tentang "Sang Musuh". Foucault secara tegas menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bergerak melalui paksaan fisik, namun terjalin dalam produksi makna untuk mendisiplinkan pikiran bahkan mengatur secara subtil tindakan manusia.

Di era pra modern, radikalisme berdasar dogma keagamaan digunakan untuk menjustifikasi adanya "Perang Suci" demi ekspansi teritorial. Bertransformasi dalam dunia modern, dan berkembang menjadi ideologi politik yang melakukan resistensi atau mempertahankan status quo. Jika memandang dari konteks kolonialisme, maka ada banyak gerakan perlawanan yang dilabeli "Teroris" oleh penguasa, tapi dianggap pahlawan oleh masyarakat lokal. Tentunya ini memperlihatkan bahwa kategori teroris atau radikal merupakan hasil pertempuran kognisi dalam struktur kekuasaan.

Carl Schmitt mendeskripsikan bahwa politik berpusat pada distingsi kawan-lawan (friend-enemy distinction). Sehingga radikalisme selalu menggunakan musuh sebagai objek antagonisme, dikonstruksikan lewat adanya dehumanisasi & propaganda. Kelompok radikal menyatakan bahwa mereka bergulat demi melawan musuh yang lebih besar—ideologi, negara, atau sistem yang dirasa tidak adil. Disisi lain, negara pun memakai wacana sama untuk menjustifikasi perilaku represif pada kelompok yang dirasa sebagai ancaman bagi stabilitas. Dengan begitu, makna radikalisme bukanlah terkungkung dalam pandangan tentang ekspresi ideologis namun kesatuan dari permainan politik dimana setiap pemain berupaya untuk membentuk "kebenaran" yang menguntungkan mereka.

Produk marginalisasi struktural inilah yang timbul akibat keserakahan untuk mempertahankan kepentingan sepihak aktor-aktor penguasa. Dengan memakai pisau analisis geneologis, maka pandangan ideologi radikal harus dimaknai sebagai evolusi narasi kekuasaan, dari dogma hingga doktrin, dari resistensi teks sampai justifikasi politik. Di era geopolitik global yang telah berkelindan bak pusaran pragmatisme saat ini, produksi terorisme juga berkaitan dengan asimetri kekuasaan dalam mendistribusikan akses terhadap dominasi wacana & sumber daya menjadi faktor krusial dalam radikalisasi individu bahkan kelompok yang teralienasi secara epistemik.

Namun realitanya, kebijakan pendekatan yang diambil untuk menghadapi terorisme selama ini lebih cenderung berfokus pada respons yang koersif seperti war on terror, malah memperburuk siklus kekerasan. Pendekatan sentralistik & militeristik nyatanya tidak efektif dalam memangkas akar radikalisme, tapi hanya mengatasi masalah sesaat. Disisi lain, program deradikalisasi berbasis komunitas menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan untuk mencegah upaya perekrutan kelompok ekstrimis.

Studi RAND Corporation memperlihatkan bahwa pendekatan sosial dengan basis inklusifitas cenderung efektif apabila dikomparasikan dengan strategi militer untuk mengurangi kuantitas kelompok teroris. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fakta ontologis terkait bagaimana terorisme bisa terbentuk, dan berupaya menyajikan rumusan kebijakan yang lebih efisien untuk menanggulangi radikalisme. Pendekatan interdisipliner dalam mengolaborasikan filsafat sosiologi, politik, agama, dan keamanan menjadi titik krusial untuk merangsang strategi yang komprehensif.

Deradikalisasi tidak boleh hanya bertumpu pada intervensi negara, namun wajib melibatkan peranan aktor non-negara layaknya masyarakat sipil, organisasi internasional, lembaga pendidikan untuk memfasilitasi dialog inklusif. Ekspresi krisis eksistensial akibat adanya asimetri interpretasi dan politisasi identitas harus diatasi berdasarkan pada pemahaman yang tajam terkait bagaimana narasi kekerasan dibentuk dan berproduksi dalam struktur sosial. Penelitian ini juga diharapkan menjadi literatur yang berkontribusi dalam menyajikan kebijakan yang berorientasi pada transformasi bernalar untuk mengubah paradigma yang dominan dalam diskursus terorisme selama ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah eksplorasi akademik dengan berupaya untuk menggugat fabrikasi makna dalam struktur kekuasaan. Memakai metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kritis dan geneologi, tulisan ini berupaya untuk melacak jejak ontologis dari narasi universal tentang terorisme dan radikalisme berproduksi, tersirkulasi dalam lanskap perpolitikan yang terdominasi oleh kepentingan negara. Ini bukanlah paparan biasa, namun otopsi epistemik terhadap literatur historis, propaganda politik dan kebijakan negara. Dengan menilik arsip kekuasaan, riset ini mengevaluasi bagaimana kategori “radikal” dan “teroris” bertransformasi sebagai diskursus konstruktif yang diasuh dalam mekanisme kontrol subtil dan eksklusif, bukan semata-mata realitas objektif.

Data diperoleh dari studi literatur, observasi partisipatif virtual dan analisis narasi kritis. Mendigdayakan dokumen sejarah dan berbagai karya-karya dari Michael Foucault, Carl Schmitt, dan Friedrich Nietzsche. Disisi lain, perbincangan semi-terstruktur dengan praktisi dan akademisi membuka khazanah dan ruang nalar bagi tafsir diluar pandangan resmi negara. Teknik analisis yang digunakan merupakan kolaborasi dari kontekstualisasi sosio-politik, dekonstruksi naratif dan geneologi konseptual dengan tujuan mengevaluasi kebenaran dibalik wacana radikalisme yang terdistorsi akibat konstruksi legal dari instrumen kekuasaan.

Dengan proposisi yang tajam, penelitian ini menguak fakta bahwa definisi terorisme dan radikalisme tidak mutlak, namun hasil dari produk kepentingan ekonomi dan politik yang diperkuat lewat narasi hegemonik. Dengan segala aparatus ideologis, negara hadir sebagai arsitek untuk meredefinisikan demi mengendalikan wacana publik tentang terorisme. Kebijakan koersif, represif dan militeristik yang dijalankan cenderung melanjutkan siklus kekerasan bukan menghentikannya. Sehingga luaran kebijakan yang ditawarkan bukan sebatas deradikalisasi teknokratis namun pendekatan berbasis komunitas untuk mewartakan inklusivitas dalam dialog, tidak dengan tindakan yang memperkuat kontradiksi sosial. Penggunaan metodologi kritis untuk menelanjangi struktur kekuasaan menjadikan penelitian ini sebagai literatur transendental untuk membuka kemungkinan baru dalam meredefinisi makna terorisme dan radikalisme dalam kontestasi politik global seraya mengganggu hegemoni wacana yang selama ini berkelindan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terorisme Sebagai Produk Epistemik: Dari Primordialisme ke Radikalisme

Terorisme tidak boleh dimaknai sebagai tindakan brutalisme yang membawa ketakutan bagi masyarakat, namun ia adalah instrumen epistemik dari narasi yang tersusun oleh kekuasaan demi mendikte siapa yang layak menentukan definisi dan mereka yang akan dikambing hitamkan ketika kekacauan terjadi. Fasilitas kognisi seringkali dibatasi oleh makna terorisme yang disampaikan negara. Sehingga mayoritas masyarakat akan memandang terorisme sebatas produk ekstrimisme. Namun jika

direnggangkan agar bersifat elastis, maka definisinya bergerak lebih daripada itu. Diksi “teroris” ditentukan oleh siapa yang melakukannya bukan karena aksi. Negara membantai masyarakat sipil, membakar desa dan menjajah tanah orang lain, tetap berakting suci diatas panggung global. Sedangkan seorang lelaki berjanggut panjang yang bergerak melakukan resistensi terhadap kemaksiatan dengan rakitan senjata langsung terdiktomi sebagai “radikalist”. Sudah saatnya kita menguliti hipokrasi seperti ini.

Mereka yang memonopoli kekuasaan akan mengubah narasi publik bahwa kekerasan yang mereka lakukan adalah “perang melawan teror”, “stabilisasi keamanan” dan “operasi militer”. Disisi lain, kelompok yang teralienasi dalam relasi kekuasaan mencoba bergerak dengan cara sama dijadikan musuh publik. Jika menggunakan metodologi ala Michael Foucault dalam Geneologi, maka kita tidak akan terbelenggu dan tersungkur dalam moralitas picisan yang dirangkai oleh kekuasaan. Karena Friedrich Nietzsche pernah bersuara bahwa moralitas adalah fasilitas dari mereka yang memenangkan perang dalam sejarah. Sepanjang sejarah modern, perang terhadap “terorisme” , sudah tentu pemenangnya adalah elita global dan negara raksasa yang berupaya melanggengkan kontrol kekuasaan.

Sehingga untuk menilik bagaimana transformasi terorisme yang bersua pada narasi politik modern, maka kita perlu melacak jejak sejarahnya, membongkar bahkan menelanjangi kebenaran tentang proses konstruksi menjadi sebuah wacana hegemonik. Geneologi tidak terjat dalam definisi sederhana tentang melihat asal-usul suatu konsep, namun mengevaluasi sebuah evolusi dalam pertarungan paradigma tentang narasi kekuasaan. Ada 3 fase utana untuk memandang progresifitas terorisme: a. Fase Primordial: ketika ekspresi ketimpangan bergerak dalam bentuk kekerasan. Sebelum terminologi “terorisme” digunakan, ada suatu bagian dalam kriminalisme purba yang sangat fundamental yakni kekerasan.

Di era primitif, kekerasan merupakan cara negosiasi politik paling purba yang dapat dilacak dalam berbagai literatur sejarah. Karena itu adalah mekanisme resistensial terhadap akses pada struktur kekuasaan. Jika ada kelompok kecil yang berupaya melawan kelompok besar, maka jalur legal tidak bisa ditempuh. Mereka harus bersembunyi, menyusun taktik gerilyawan, bahkan menciptakan berbagai ancaman dibalik bayang-bayang. Dari sinilah embrio terorisme muncul sebagai mekanisme bertahan hidup terhadap penindasan bukan sebatas subjek inheren yang banal. Ini realita dalam sejarah dunia, Penjajah eropa mendiskreditkan perlawanan pribumi sebagai “pemberontakan”.

Ketika rakyat Aljazair memerangi prancis, mereka dilabeli “teroris”. Dikala pejuang kemerdekaan indonesia melawan belanda, mereka didefinisikan sebagai “ekstrimis”. Padahal, respons itu bukanlah terorisme namun resistensi terhadap kolonialisme. Nyatanya mereka yang terfasilitasi oleh mesin propaganda yang lebih mumpuni seperti media global dan kekuatan kolonial memiliki hak yang lebih besar untuk mendefinisikan fenomena dalam sejarah. B. Fase Konstruksi Kebenaran: Ditengah perkembangan sistem politik modern, negara konsisten menyokong institusi yang secara spesifik mengendalikan narasi. Dari sinilah muncul diksi “radikalisme” yang dirangkai sebagai fasilitas untuk melabeli bahkan mengkriminalisasi kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap status quo. Tidak lagi bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku.

Berbagai kriteria musuh dibuat oleh negara seperti Musuh dari luar (kelompok yang dirasa membahayakan stabilitas global seperti kelompok militan di timur tengah) dan Musuh dari Dalam (oposisi politi yang berpotensi menghantam kekuasaan seperti aktivis anti-pemerintah yang dilabeli ekstrimis). Pola ini diteruskan dalam gerak sejarah. Ketika Nelson Mandela menjadi pemimpin kelompok bersenjata terhadap apartheid, ia adalah teroris oleh pemerintah Afrika Selatan. Tapi dikala ia berhasil dan menjadi presiden,

definisi itu mendadak hilang. Itu adalah satu diantara banyaknya fenomena yang harus dilihat sebagai proses labelisasi politik kekuasaan. C. Fase Institusionalisasi Wacana: Disaat negara telah berhasil menguasai narasi tentang terorisme, ketakutanpun digunakan sebagai alat politik.

Kondisi kecemasan yang dikemas secara subtil untuk mengontrol kebijakan tanpa adanya perlawanan dari masyarakat. Ini adalah momentum disaat definisi terorisme bertransformasi dari sebatas ancaman sebagai industri politik global. Undang-undang anti terorisme disahkan demi membuka peluang bagi siapa saja yang dirasa mencurigakan tanpa adanya proses legal hukum yang adil. Mediapun mengorganisir kebengisan dengan mendukung kebijakan negara dengan menampilkan wajah-wajah tertentu sebagai “kelompok terorisme”. Keuntungan industri militer karena awetnya perang terhadap teroris yang mengonsumsi anggaran biaya masif. Contoh konkrit bisa dilihat dalam “War On Terror” rancangan Amerika Serikat pasca 9/11.

Dengan justifikasi membasmi terorisme, invasi terhadap Afganistan dan Irak dilakukan hingga membunuh ratusan ribu masyarakat sipil, menghancurkan berbagai fasilitas negara dan melahirkan lebih banyak kelompok radikal lainnya. Namun tindakan tersebut tidak dipandang sebagai upaya terorisme. Malahan narasi universal menyebutnya sebagai “perang demi kebebasan”. Inilah klimaks dari hipokrisi dunia, terorisme hanya eksis jika dibuat oleh mereka yang kalah dalam percaturan kekuasaan. Jika analisis tajam kita gunakan, maka fakta bahwa terorisme adalah produk dari ketimpangan kekuasaan bukan sebagai objek yang inheren jahat, benar adanya. Sehingga diksi “teroris” cenderung bersifat politis daripada objektif. Wacana terorisme adalah salah satu fasilitas negara untuk mendisiplinkan kebenaran yang terselubung dalam opini publik bahkan memonopoli narasi atas kekerasan. Kalau berhasrat untuk memaknai terminologi terorisme, maka nalar harus melampaui propaganda negara yang dilakukan secara subtil bahkan menggali lebih dalam untuk melihat mekanisme produksi narasi yang mengendalikannya. Dibalik setiap narasi, ada kekuasaan yang bersemayam dan dari realita ini narasi sejarah akan disusun berdasarkan mereka yang kuat.

Menyingkap Represi Di Balik Propaganda Kontra-Terrorisme

Dalam klaim yang dilekatkan pada dirinya sebagai pengayom rakyat, benteng peradaban dan penjaga ketertiban, Negara selalu menyusun propaganda selektif untuk membangun persona publik. Nyatanya, kebrutalan negara lebih besar daripada kelompok yang mereka labeli sebagai teroris. Ketika sejarah dievaluasi kembali, narasi terorisme kerap kali dipakai sebagai alat represi politik untuk menghantam resistensi publik. Dengan memanfaatkan fasilitas resmi, negara memonopoli definisi tentang siapa yang harus dibungkam lewat regulasi yang sifatnya represif.

Sejarah Amerika Latin di masa perang dingin lewat kelompok buruh, kaum kiri dan berbagai gerakan sosial menjadi contoh nyata dari proses pelabelan buta hanya karena mereka ingin menggugat kebijakan neoliberal dan rezim militer yang didukung Amerika Serikat. Ketika jalur militeristik digunakan untuk membantai rakyat maka penghilangan individu yang dianggap ancaman dan subversif menjadi normalisasi. Argentina dengan ribuan orang yang menghilang dalam “Dirty War” (1976-1983), Di Chile, Augusto Pinochet menculik, menyiksa, dan menghabisi lawan politik dengan alasan “melawan komunisme”, Di Guatemala, komunitas petani yang menyuarakan hak tanah malah diberi label gerakan radikal dan dijadikan target operasi militer.

Modus operandi klasik negara inilah dengan membangun narasi kolektif, menghadirkan kecemasan lalu melegalkan kebijakan represif dengan dalil stabilitas nasional. Ironisnya, ini dibanggakan sebagai demokrasi. Jika memandang terorisme sebagai alat kontrol sosial, tentunya kita tak boleh mengabaikan fakta bahwa negara

memakai ketakutan demi memperluas monitoring pada rakyatnya sendiri. Pandangan Pinoptikon. Era Pasca 9/11 dimanfaatkan Amerika Serikat untuk menciptakan momentum demi memperluas kekuasaan negara atas personifikasi warga masyarakatnya.

Kebijakan Patriot Act, memberikan keleluasaan masif kepada pemerintah untuk menyadap percakapan telepon bahkan berbagai saluran komunikasi digital tanpa perlu izin dari pengadilan, memata-matai pergerakan masyarakat dengan teknologi pengawasan massal, serta menahan siapapun tanpa adanya proses hukum yang transparan dengan alasan “keamanan nasional. Ini semua dijalankan dengan dalil: “Perang Melawan Teror”. Namun jika ditilik secara kritis sebenarnya narasi yang dibuat bertujuan untuk menyalurkan ketakutan permanen agar rakyat menjadi tunduk pada kekuasaan bukan untuk menghapus terorisme.

Bukti yang beredar dalam ruang publik justru menunjukkan bahwa produk terorisme semakin berkembang bukan berkurang apalagi habis. Perang bertahun-tahun di Timur Tengah tidak mendatangkan stabilitas malah Afghanistan hancur lebur, Suriah bertransformasi jadi ajang perang proksi, dan Irak menjadi ladang konflik berkepanjangan. Kita harus mengevaluasi kembali berbagai kebijakan represif yang benar-benar bertujuan memberantas terorisme, bukan sebagai proyek ekonomi-politik global untuk mengawetkan dominasi kekuasaan. Setiap kali aksi terorisme terjadi, reaksi yang terlihat hampir selalu sama: Politisi menyuarakan tindakan keras dan regulasi darurat, media membantai publik dengan berita penuh ketakutan dan membeludaknya kontrak milyaran dolar perusahaan senjata serta industri.

Tentu bukan kebetulan, karena ini adalah produk kooptasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan besar layaknya Lockheed Martin, Raytheon, dan Northrop Grumman menghasilkan pendapatan signifikan dari konflik yang berkelanjutan. Ketika ketakutan dinarasikan, anggaran militer pun teralokasikan. Variabel yang sama, skema yang tidak berubah ini menjadikan ancaman terbesar bagi perselingkuhan 3 sisi antara kapitalisme, politik dan militer adalah perdamaian. Negara memakai alasan peningkatan anggaran keamanan agar setiap koridor didalamnya tetap diuntungkan. Industri militer pun memerlukan konflik dan perang agar produk mereka tetap terjual, dan media butuh kecemasan untuk meningkatkan rating.

Sebagai instrumen politik, terorisme dipakai demi membentuk opini kolektif oleh kekuasaan. Ketika suatu kelompok dilabeli sebagai “teroris”, maka hak asasi yang melekat seperti berbicara dan membela diri pun ditanggalkan. Itulah fakta yang tak dapat dikecualikan oleh kekuasaan. Dalam fenomena politik modern, “teroris”, “radikal”, “ekstrimis” digunakan untuk membungkam oposisi politik ketika ada yang menentang kekuasaan, melegitimasi berbagai kebijakan represif dan tindakan tercela dengan membuka jalan bagi aparat untuk menindaklanjuti keadaan secara brutal tanpa konsekuensi hukum, bahkan mampu membentuk narasi komunal dengan menampilkan citra tertentu sebagai ancaman.

Istilah yang dipakai secara selektif untuk tujuan tertentu menjadikan keberadaan negara sebagai bentuk kemaksiatan dan kenajisan. Itulah cara kerja narasi. Karena kekerasan selalu diberi keleluasaan jika itu adalah negara, namun jika datang dari pihak yang tertindas maka akan dipandang sebagai kejahatan. Sebagai produk hasil konstruksi oleh kekuasaan demi mengawetkan status quo, maka definisi terorisme tidak sesederhana propaganda media. Pahami bahwa jika mereka yang membawa ketakutan adalah teroris, maka negara adalah yang paling terbesar diantara mereka. Jika membunuh rakyat tak berdosa adalah definisi teroris, maka berbagai rezim militer di Amerika Latin adalah Subjek utamanya. Jika untuk mencapai tujuan politik dengan memakai kekerasan sebagai jalannya maka seluruh imperium kolonialisme dan kapitalisme perang adalah pemain

utamanya.

Propaganda harus mampu dipandang sebagai mekanisme kekuasaan yang tak terlihat, bergerak dalam ranah sublimasi di setiap narasi. Kepatuhan publik adalah proses pendisiplinan yang diidam-idamkan elite politik. Untuk membongkar kedok bagaimana kekuasaan menciptakan, mengontrol dan bereproduksi dalam makna kekerasan politik bermuara lebih jauh pada fenomena terorisme, pendekatan geneologi digunakan untuk membedah secara tajam. Makna terorisme tidak boleh didefisitkan menjadi sebatas aksi ekstrimis yang hadir akibat kevakuman moral, tapi produk dari wacana yang dikonstruksikan oleh negara, aktor politik dan media.

Kenyataannya, siapa yang terdefiniskan sebagai “teroris” bukanlah tentang fakta namun tentang siapa yang berhak mendefinisikannya. Michael Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tak hanya menekan, namun juga menciptakan makna sosial. Negara mendefinisikan terorisme dan menggunakan pendekatan militeristik untuk menumpasnya. Perlu dipahami bahwa makna terorisme tidak terkungkung pada kategori tetap namun sangat fleksibel, bertumpu pada kepentingan politik. Dulu Nelson Mandela dikategorikan sebagai teroris namun ketika rezim berganti, dia dipandang sebagai ikon perdamaian. Pandangan Carl Schmitt di bukunya *friend-enemy distinction* memaparkan bahwa politik pada dasarnya menentukan siapa yang menjadi musuh.

Di era modern pasca peristiwa 9/11, para teroris dijadikan musuh universal yang membuat negara memperkuat kebijakan represif dengan dalih keamanan nasional. Pandangan serupa datang dari Thomas Hobbes yang menyerukan bahwa Negara adalah solusi atas kekerasan kodrati manusia melalui monopoli kekuasaan. Namun kenyataannya, negara juga adalah pelaku kejahatan terbesar. Eksekusi, perang, dan represi terjadi dengan justifikasi hukum hingga kekerasan negara menjadi sah. Friedrich Nietzsche menonjolkan pikirannya bahwa moralitas & hukum adalah produk relasi kuasa untuk mendefinisikan yang benar dan salah. Dengan penalaran ini, alasan “operasi militer” akan digunakan ketika negara membunuh. Namun, kalau ada yang merespons perilaku itu dengan perlawanan, maka itulah “terorisme”.

Dikotomi sebagai hasil dari mereka yang mengendalikan narasi. Terorisme & radikalisme tidak muncul dari kehampaan, namun karena gejolak krisis eksistensial dan alienasi sosial. Benedict Anderson dalam *Imagined Communities* mendeskripsikan pikirannya bahwa identitas nasional dirangkai secara imajiner, dan ketika dibawa ke konteks ekstrimisme, wacana *victimhood* memainkan peran krusial dalam mobilisasi. Subjek teradikalisasi seringkali merupakan mereka yang berada dalam kehampaan ruang ekspresi politik. Marc Sageman menegaskan bahwa radikalisasi lebih banyak kuantitasnya di kalangan individu yang terdampak dislokasi sosial daripada sebatas doktrin ideologi atau agama.

Radikalisme merupakan respons terhadap keterasingan, bukan sebatas fanatisme buta. Charles Tilly dengan *The Politics of Collective Violence* miliknya menunjukkan bahwa kekerasan politik adalah reaksi massa terhadap represi negara. Studi RAND Corporation membuktikan bahwa kebijakan *war on terror* yang bersifat koersif justru memperburuk siklus kekerasan. Perlawanan menjadi semakin masif apabila negara terus membelenggu. Disisi lain, pendekatan yang menargetkan komunitas cenderung efektif untuk meredam ekstrimisme jika dibandingkan dengan taktik militeristik.

The Wretched of the Earth karya Frantz Fanon mendeskripsikan fenomena kekerasan yang kerap kali dilakukan merupakan respons terhadap kemaksiatan struktural yang mereka alami. Jika mengevaluasi perkembangan terorisme, maka kesamaan variabel bahwa ia terlahir dari marginalisasi politik, kontrol ketat narasi universal, dan ketimpangan ekonomi menjadi alasan utama karena ruang oposisi dikedir. Maka,

pendekatan represif tidaklah menjadi jawaban yang tepat. Deradikalisasi yang efisien harus berdasar pada inklusivitas sosial dan reformasi kebijakan keamanan. Memahami terorisme tidak hanya dengan memandangnya sebagai ancaman keamanan namun pahamiilah sebagai respon bagi ketimpangan sosial, politik dan ekonomi yang berskala masif. Jika tidak ada transformasi fundamental dalam sikap yang diambil negara untuk memotong akar ketidakadilan, war on terror hanya akan menjadi indikator berlanjutnya siklus kekerasan.

Ketakutan Sebagai Modus Operandi Represi Negara & Kekerasan Sebagai Fasilitas Dehumanisasi

Sebagai algoritma politik, ketakutan merupakan hasil konstruksi yang bereproduksi dan disebarluaskan dengan aspek yang sangat presisi. Logika kekuasaan menerangkan bahwa ancaman bukanlah suatu hal untuk diberantas namun selalu dikelola agar senantiasa relevan. Fenomena 9/11 adalah salah satu contoh adanya fasilitas instrumen epistemik yang dimiliki negara demi mentransformasikan ketakutan sebagai legitimasi bagi kebijakan ekspansi dominasi. Nalar kita keliru apabila memandang Osama bin Laden sebagai figur antagonis, namun ia adalah produk yang senagaj di design untuk menghidupkan fiksi geopolitik mengenai “poros kemaksiatan”.

Agama dijadikan arsitek simbolik yang mengonstruksikan bineritas bagi peradaban. Banyak negara seperti Irak dan Afganistan pun menjadi target kebijakan militeristik bahkan menjadi ladang ekperimental untuk imperialisme kontemporer. Patriot Act yang disahkan di Amerika Serikat menjadi simbol transisi dari negara hukum menjadi negara pengawas. Privatisasi warga bukan lagi menjadi hak namjn konsesi yang diberikan negara, perlindungan tidak lagi bertindak dalam bentuk keamanan, namun dipakai alasan untuk menormalisasi pengontrolan. Sebagai komoditas yang bernegosiasi dengan ketundukan, kebebasan tidak lagi dipandang sebagai prinsip ontologis yang melekat pada asasi manusia.

Terminologi Foucault tentang “Regime of Truth” menjadi cara dimana negara menciptakan kerangka naratif yang harus dipatuhi tanpa digugat. Ketika keadaan seperti ini dipaksakan, maka ancaman akan terus bersarang menjadi bahan bakar bagi kapitalisme militer. Edward Snowden pernah berkata “negara tidak mau ada akhir dari perang melawan teror. Mereka memerlukan perang ini untuk mengekspansi infrastruktur represi.” Dapat dikatakan bahwa perang adalah taktik untuk mengawetkan konflik bukan cara untuk mendapatkan kemenangan.

Radikalisme selalu dipandang sebagai tindakan kekerasan akibat fanatisme, namun nyatanya ia adalah produk eksklusi kultural. Distorsi makna sebagai patologi ideologis selalu dipakai negara secara sengaja untuk mereduksi narasi intelektual. Jika radikalisme ditilik maka logika kekuasaan harus dikoreksi sebagai efek dari ketimpangsn. Tindakan radikalisis bukanlah produk dari kelompok yang fanatik namun respons akibat keterasingan sosial. Mereka adalah korban dari sistem yang melanggengkan alienasi. Ketika literatur sejarah dievaluasi kembali maka ada kesamaan variabel bahwa akses terhadap politik, keadilan, dan ekonomi terkontrol oleh kekuasaan. Akibatnya resistensi radikalisme menjadi semacam keniscayaan. Terlihat dari fenomena revolusi prancis yang terjadi akibat eksploitasi aritokrasi terhadap rakyat jelata. Begitu juga dengan pergerakan buruh di abad ke-19 yang pecah akibat hak pekerja yang dihancurkan kapitalisme. Atau bahkan tindakan radikalisme islam modern yang dilakukan sebagai akibat dari adanya represi ekonomi dan politik dari dunia muslim.

Negara tidak pernah mencoba melacak jejak ontologis terkait proses dimana radikalisme dipilih menjadi suatu opsi. Hipokrisi negara dalam mendigdayakan sistem dengan menyingkirkan manusia, lalu kaget pabila ada perlawanan dari mereka yang ingin

disingkirkan. Oliver Roy pernah mengungkapkan bahwa “radikalisasi bukan terjadi karena islam, namun karena islam yang terputus akibat tradisi”. Namun tentunya Wacana resmi selalu mengasumsikan kebenaran versi mereka bahwa radikalisasi adalah produk dari islam yang sangat konservatif. Tapi sudah saatnya tesis ini dibalik karena masalahnya tidak terletak pada kuatnya islam namun justru karena terputus dari akar kulturalnya.

Analisis tajam dalam membongkar mitos rasionalitas yang melekat pada teroris sebagai janin dsri lingkungan puritan islam tertuang dalam “Jihad and Death: The Global Appeal of Islamic State”. Sebaliknya, mereka yang terlibat merupakan komunitas yang tidak memiliki ketertarikan pada tradisi otentik dari islam. Mereka tidak memahami figh, namun mengerti propaganda jihadisme di media sosial, tidak terikat dengan komunitas muslim namun justru merasakan dislokasi budaya, radikalisme tidaklah dipandang sebagai ekspresi iman namun respon kemarahan eksistensial.

Dari sinilah muncul terminologi “Islamized Radicalism”, bukan “Radicalized Islam.” Maknanya adalah islam bukan penyebab radikalisasi, naum hanya dipakai sebagai linguistik simbolik bagi kelompok yang mencari makna ditengah kemampuan struktural. Dengan begitu, narasi yang cenderung menunjuk islam sebagai embrio terorisme adalah tindakan manipulatif dan ahistoris. Dikancah dominasi dalam dunia yang terdikte, kekerasan timbul sebagai bahasa yang hanya tidak memunculkan reaksi, namun dipahami oleh mereka yang tertundak.

Magnum opus Frantz Fanon yang berjudul *The Wretched of the Earth*, meruntuhkan mitos moralitas dari kolonial yang merangkai resistensi sebagai banalitas, sembari mengabaikan kekerasan yang dilakukan negara sebagai arsitektur kebrutalan untuk mendominasi. Tulisannya tidak sementara meromantisasi revolusi berdarah, namun membongkar hipokrisi kekuasaan yang mengilustrasikan resistensi sebagai terorisme, namun membungkam kebenaran dalam sejarah panjang penindasan yang sangat kejam.

Ketika Aljazair dijajah prancis itu dibilang “misi peradaban”. Namun ketika respons balik dari Aljazair untuk melawan represi itu, mereka disebut “teroris”. Disinilah ranah “regime of truth” yang dikenalkan oleh Michael Foucault dimana kebenaran adalah hasil konstruksi oleh mereka yang memiliki relasi kuasa untuk mendefinisikan wacana, bukan lagi pada objektivitasnya. Mekanisme dehumanisasi yang bergerak secara struktural menegaskan bahkan kekerasan diproduksi akibat respon eksistensial. Dikala sistem membungkam suara yang terasingkan, disitulah perlawanan bukan lagi menjadi opsi namun keniscayaan. Pesan sejarah dalam berbagai fenomena seperti Revolusi Haiti (1791–1804) sebagai jalan pembebasan dari adanya sistem perbudakan yang hanya mungkin ditempuh oleh pemberontakan, Revolusi Bolshevik (1917) dimana menandakan resistensi dari akumulasi ketidakadilan ekonomi yang terjadi akibat kemaksiatan monarki, dan Intifada Palestina sebagai

Kontemplasi kritis dari kolonialisme kontemporer yang menindas. Namun tentunya dari kacamata propaganda kekuasaan, ini tidak lebih invasi terhadap tatanan. Bukan sebuah perjuangan. Oleh sebab itu, mereka yang terjalin dalam rajutan kekuasaan akan selalu memandang revolusi sebagai pemberontakan, namun tak sadar bahwa represi mereka tak pernah mrngedepankan adab. Mitos keberadaan deradikalisasi hanya menjadi alat kosmetik negara demi membangun citra bahwa mereka “melawan ekstremisme”. Namun buktinya, taktik yang diterapkan oleh rezim yang otoriter bertransformasi sebagai proyek kontrol sosial dibanding rekonsiliasi nyata. Mulai dari pembungkaman oposisi, pembuatan proyek pemulihan tanpa adanya reformasi struktural bahkan kebijakan yang lebih mengedepankan retorika daripada transformasi sosial.

Banyak wadah khususnya RAND Corporation menyajikan kerangka pikiran menarik dalam menanggulangi terorisme, ekstremisme bahkan radikalisme. Namun, semua itu

kerap kali tidak berhasil akibat mengesampingkan indikator krusial yang sangat fundamental bahwa radikalisme merupakan produk ketidakadilan struktural. Kebijakan deradikalisasi yang tuntas bukan hanya mengedepankan “moderasi” namun memfasilitasi jalan keluar dari eksklusi sosial. Banyak negara Skandinavia menawarkan strategi yang substansial salah satunya di Denmark lewat kebijakan reintegrasi mantan ekstremis berbasis pada komunitas lokal dengan menyediakan akses ekonomi yang lebih konkret akibat frustrasi sosio-ekonomi, menjalankan fungsi rehabilitasi bukan hanya berbentuk monitoring represif namun dalam konteks psiko-sosial, membuka wadah rekonsiliasi bukan indoktrinasi negara.

Hasilnya terlihat jelas dari Tingkat reoffending yang jauh lebih rendah dari sebelumnya bila dikomparasikan dengan strategi militeristik. Tentunya ini harus menjadi penanda kemawasan bahwa deradikalisasi adalah proses pembangunan kondisi sosial bukan hanya tentang “meluruskan paham”. Paradigma bernalar yang menempatkan terorisme sebagai problem keamanan haruslah direvisi kembali, karena ini bersinggungan dengan ranah epistemik. Perang melawan teror hanya taktik produktif yang bertujuan menopang kekuasaan dengan menggunakan ketakutan dan radikalisme bukanlah produk islam, namun efek dari keterasingan sosial yang selama ini diasuh oleh eksklusifitas sistem. Sudah saatnya, kognisi masyarakat dibongkar agar tidak terkungkung dalam mitos bahwa islam adalah variabel utama yang menunjang terjadinya radikalisme. Namun sekedar medium ekspresi.

Wacana simplistik yang mengaitkan keberadaan radikalisme dengan agama harus ditiadakan. Dibalik setiap narasi, bersarang kepentingan kekuasaan yang ingin diawetkan. Perseteruan mengenai definisi radikalisme tidak hanya melekat pada soap ekstremisme keagamaan namun pekat pada siapa punya hak dalam menentukan definisi kekerasan. Ditengah tragedi dehumanisasi, kekerasan seringkali merupakan jalan satu-satunya untuk mengklaim kembali kemanusiaan yang dirampas. Bukan sekedar penyimpangan sosial.

Radikalisme Sebagai Produk Politik: Kamufase Otoritarianisme Dalam Narasi Teror

Ditengah kontrol narasi teror dan ketakutan, dibalik jubah kamufase sebagai pelindung, negara berlaku cerdik namun nyatanya ia adalah predator. Guliran wacana yang mendominasi ruang publik selalu memposisikan terorisme sebagai musuh yang menginvasi kedamaian dan tatanan sosial, seakan radikalisme adalah penyakit yang gejalanya bertumbuh secara spontan dari kealpaan intelektual. Jika tabir kemunafikan ini dibongkar dengan memaksimalkan kapasitas pikiran untuk menakar geneologisnya, maka ada muara kelam yang pasti ditemui.

Kenyataannya bahwa radikalisme tidak muncul dari entitas yang hampa namun produk konstruksi kognisi yang diprakasai oleh kekuasaan. Kita terlalu nyaman berendam dalam ilusi bahwa radikalisme merupakan anomali sejarah politik. Namun, jika sejarah dievaluasi kembali maka ada siklus yang konstan bahwa apabila suatu sistem berubah menjadi terlalu otoriter, maka tentu ia memerlukan figur imajiner yang dijadikan target represinya. Maka, narasi terorisme tidak hadir untuk mendeskripsikan realita namun untuk melahirkan realita itu sendiri. Rezim kebenaran yang diprakasai untuk menumbangkan mitos bahwa tanpa negara kita akan terjerumus dalam kekacauan.

Kekuasaan akan selalu mencari jalur untuk menjinakan pemberontakan. Tradisi filsafat politik selalu menyajikan fakta bahwa kekuasaan yang dibangun oleh negara selalu berasaskan dua alat utama yakni represi dan narasi. Variabel yang sama selalu diteruskan sepanjang peradaban bukan hanya dengan menindas namun mengontrol makna untuk memaknai realitas sosial. Inilah titik dimana geneologi radikalisme menjadi sangat krusial. Dengan sekedar menggunakan makna yang disajikan oleh negara, maka kita telah

dijebak dalam produk kepentingan politik tertentu. Konteks sejarah dimana Friedrich Nietzsche telah menggambarkan bahwa sang pemenang akan menulis dan mengontrol makna sejarah. Makna radikalisme bukanlah aspek yang objektif namun strategi semu dari kekuasaan untuk melanggengkan cengkraman hegemoninya.

Konflik antara “Moralitas Tuan” dan “Moralitas Budak” menjadi bukti dimana kedua aspek ini akan saling bersinggungan sepanjang peradaban manusia. Kontradiksi antara sistem nilai yang terdefiniskan oleh kekuasaan dengan resistensi dari mereka yang ditindas. Maka, tiap rezim kekuasaan akan selalu menantang makna ontologis dari teroris atau radikal. Sebagai kategori politik, makna terorisme selalu dikontrol. Sehingga ini bukan sekedar realitas sosial namun konstruksi diskursif. Kebijakan militeristik tidak hanya dipakai untuk menekan mereka yang dikategorikan radikal, dan diperkuat dengan memaksimalkan narasi publik untuk mendisiplinkan kognisi komunal terkait kebenaran.

Di setiap segmen masyarakat, melekat apa yang disebut oleh Foucault sebagai arsip kekuasaan (*archive of power*). Ini merupakan kompilasi wacana, dokumen bahkan simbol yang dipakai untuk menentukan mekanisme suatu fenomena dipahami oleh massa. Arsip kekuasaan dalam konteks radikalisme tentunya dipenuhi oleh narasi yang mendeskripsikan eksistensi kelompok-kelompok tertentu sebagai ancaman pada stabilitas. Mirisnya Institusi keagamaan, civitas akademika dan media massa kerap kali direkrut untuk mengukuhkan narasi ini.

Dampaknya bisa terlihat ketika radikalisme dipandang layaknya sesuatu yang inheren dalam kelompok atau individu tertentu, bukan sebagai tragedi yang diselimuti kompleksitas yang berawal dari ketidakadilan struktural. Disinilah letak jejak operasi rezim kebenaran. Hanya boleh satu wacana yang mendominasi ruang publik bahwa negara membawa solusi dan radikalisme adalah persoalan. Peristiwa ini diperkeruh oleh peranan ketakutan demi mengawetkan otoritarianisme. Sebagai senjata paling efektif dalam politik, ketakutan gambaran Thomas Hobbes dalam *Leviathan* menunjukkan fakta bahwa manusia akan menyerahkan kedaulatannya pada negara dikala mereka merasa terancam oleh anarki. Tentunya tidak mengherankan apabila secara sistematis dan terstruktur negara mengeskalasi ketakutan ditengah masyarakat. Bisa saja kemunculan narasi terorisme merupakan arena produksi dependensi terhadap negara. Dengan mengontrol konsensus dalam mendefinisikan musuh bersama, negara memanipulasi pikiran masyarakat yang tak sadar bahwa mereka sedang terjebak dalam pusaran otoritarianisme dengan dalih proteksi.

Apabila narasi radikalisme selalu diidentikan sebagai penyakit sosial, maka tentunya konflik atas terus berlangsung. Dalam paparannya, Oliver Roy menjelaskan bahwa fenomena radikalisme lebih sering terjadi akibat keterputusan pada tradisi bukan karena keterikatan. Embrio radikalisme berkembang dari adanya fenomena keterasingan dan bertumbuh akibat pengalaman ketidakadilan bahkan kehilangan makna karena kehadiran sistem yang tidak menyediakan wadah bagi mereka. Didalam kendali oligarki atas dunia ini, sudah banyak orang yang merasa tidak memiliki tempat dalam sistem ini. Sehingga kehadiran negara lebih dipandang layaknya mesin eksklusi yang mengesampingkan kesengsaraan mereka, bukan sebagai pelindung.

Dikala kehilangan harapan terhadap sistem. Maka alternatif lain sering dijadikan pilihan dan inilah titik dimana pikiran mereka diperdaya oleh para ekstremis yang menawarkan makna bagi mereka yang teralienasi. Sejauh ini, Kebijakan deradikalisasi kerap diarahkan pada dekonstruksi ideologi, seakan masalahnya terletak pada kognisi personal. Namun perlu disadari bahwa ini merupakan kesalahan fundamental. Selama ketimpangan struktural masih terus dilakukan, maka tindakan radikalisme pasti terus berkembang. Sistem yang mengedepankan eksklusifitas harus dibongkar untuk memfasilitasi keamanan dan keadilan bagi mereka yang tertindas.

Di belakang segala retorika war on terror, negara selalu memerlukan terorisme untuk menjustifikasi eksistensinya. Itu kebenaran yang tak terbantahkan. Setiap narasi yang dikonsumsi terkait radikalisme dan semua kecemasan yang diperkeruh oleh media bahkan semua taktik represif yang dijalankan dengan dalil keamanan merupakan strategi keamanan. Semakin membengkak cengkaman kekuasaan negara tidak akan membereskan radikalisme. Namun dengan kehancuran mekanisme eksklusi yang membuat banyak orang kehilangan harapan adalah cara yang efisien. Karena definisi radikal tidak melekat pada mereka yang menolak sistem, namun keberadaan mereka yang mengawetkan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Dalam jeratan ilusi epistemik yang dibangun oleh negara ada selalu kepentingan hegemoniknya. Fenomena kekerasan akan dimanfaatkan sebagai fasilitas produksi ketakutan yang dikomodifikasi demi kelancaran tujuan politik. Ini bukanlah keniscayaan objektif namun hasil interpretasi narasi yang dikontrol oleh mereka yang berada dalam relasi kekuasaan. Secara dominan, negara diangkat sebagai aktor tunggal yang sah dalam mendistribusikan “kebenaran”, namun nyatanya ia kerap kali menjadi aktor penyokong kekerasan yang dia kutuk sendiri.

Deskripsi sejarah selalu menegaskan bahwa jika ada indikator yang menggugat otoritas, maka definisi kebenaran akan dimanipulasi untuk melawan mereka. Sehingga terminologi “teroris” tidak layak dikategorikan sebagai pandangan universal yang inheren, namun diksi elastis yang mudah dimanipulasi sesuai kepentingan. Mereka yang dilabeli teroris, bisa saja merupakan simbol perjuangan kebebasan. Tindakan represi tidak hanya dipakai oleh negara untuk mempertegas dominasi strukturnya sekaligus mengonstruksikan realitas sosial agar publik memandang bahwa kebijakan itu adalah keniscayaan untuk mencapai stabilitas.

Di tengah rezim ketakutan yang berkelindan ini, hukum tidak lagi beroperasi layaknya mekanisme keadilan namun senjata untuk menjustifikasi otoritarianisme. Dibalik narasi demokrasi, negara memperluas spektrum cengkaman kontrolnya. Kebijakan war on terror yang dipakai Amerika Serikat bukan sebatas upaya untuk memupukkan ekstremisme namun perluasan hegemoni geopolitik yang menguntungkan keberadaan industri militer. Sehingga siklusnya sulit untuk diatasi karena keberadaan perang tidak untuk dimenangkan namun dipertahankan. Karena hanya dalam konflik yang tak berkesudahan, profit akan membeludak bagi mereka yang menyiapkan sumber daya. Inilah cerminan moralitas dari sistem yang cacat memaksimalkan keadilan. Karena subjek diradikalisasi akibat ketimpangan yang terinstitusionalisasikan. Apabila kekerasan struktural dianggap kenormalan tanpa resolusi, maka siklus yang sama akan terulang dengan wajah baru dan legitimasi yang lebih canggih. Karenanya kita perlu mengintrusi kebenaran dari kelompok yang dilabeli teroris dan penyebab kemunculan mereka:

A. Dekonstruksi Kebenaran Negara Yang Represif

Definisi terorisme yang dikontrol oleh aparatus negara harus didekonstruksi. Masyarakat tidak boleh hanya menelan mentah-mentah narasi yang dilemparkan ke ruang publik, khususnya dari mereka yang punya kepentingan dalam mengawetkan status quo. Paparan komperhensif Michael Foucault tentang esensi kebenaran yang merupakan fasilitas lahiriah dari relasi kuasa dan bukan sekedar entitas netral patut dipandang sebagai pengingat tegas. Dalam berbagai fenomena, negara kerap kali memakai isu terorisme sebagai fasilitas yang efisien untuk membungkam oposisi politik, menjustifikasi kebijakan represif dan militeristik bahkan mengkriminalisasi gerakan sosial. Kekuasaan akan selalu menggunakan “musuh” agar memastikan kedisiplinan rakyatnya. Tanpa ada narasi yang

dikonstruksikan dari ancaman, alasan untuk ekspansi kekuasaan tidak akan ada bagi mereka. Sehingga sangat krusial bagi kita untuk mendekonstruksikan narasi ini bahkan menjadikannya sebagai agenda politik yang dikawal ketat oleh semua elemen masyarakat

B. Deradikalisasi Sebagai Proses Sosial & Ideologis

Mereduksi kebenaran ontologis radikalisme tidak hanya terkait pemahaman keagamaan yang semrawut. Itu adalah ekplanasi yang sangat simplisyyuk bahkan mengesampingkan aspek realitas material yang melingkupi eksistensi induvidu yang dianggap radikal. Fakta sejarah menguak bahwa, radikalisasi kerap kali terjadi bukan akibat doktrin tertentu, namu karena alienadi sosial, ekonomi dan politik. Sehingga, jika radikalisme ingin diberantas, maka solusinya terletak pada reformasi sosial, menghapus kondisi yang melahirkan radikalisme. Bukan sebatas kebijakan deradikalisasi dengan basis indoktrinasi ulang. Apabila sistem ekonomi masih dominatif dan eksploitatif, maka tentunya kita tidak bisa berharap untuk mengatasi ekstremisme. Institusi negara yang korup dibarengi dengan manuver yang diskriminatif akan memperburuk gejala radikalisme. Sehingga penting untuk menyadari bahwa menghilangkan sumber ketimpangan yang memunculkan keterasingan adalah jalan untuk menemukan jawaban.

C. Transformasi Rezim Represif Menuju Demokrasi Substantif

Negara harus mampu menanggalkan ketakutan sebagai instrumen kekuasaan. Berbagai kebijakan seperti Patriot Act dan monitoring massal hang dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia pasca peristiwa 9/11 tidak benar-benar melindungi rakyat dari ancaman terorisme, nyatanya itu hanya jalan untuk memperkuat kontrol negara atas warganya. Pada titik ini, perlu disadari bahwa demokrasi formal yang diklaim banyak negara berjalan tidak lebih dari ilusi prosedural semata. Eksistensi ontologis demokrasi tidak hanya terletak pada pemberian hak kepada rakyat, namun memastikan bahwa semuanya berdaulat atas hidup. Sehingga, tantangan kita bukan sekedar menuntut transparansi kebijakan antiterorisme, namun melacak jejak mekanisme politik ketakutan yang selama ini mengontrol kognisi kolektif kita.

D. Menghancurkan Kedok Imperialisme dalam Antiterorisme

Selama eksploitasi ekonomi masih terus dilanggengkan oleh korporasi multinasional, intervensi militer yang sewenang dan berbagai ketimpangan distribusi sumber daya maka resistensi yang dilabeli radikal akan selalu ada. Sehingga indikator penentunnya tidak layak bila hanya dilekatkan pada pandangan bahwa keberadaannya adalah hasil dari isolasi dinamila global. Produk kepentingan yang diseludupkan dalam berbagai kebijakan represif negara adidaya saat ini adalah bukti kongkrit dari adanya neo-kolonialisme dimana dengan dalil atabilitas, negara-negara lain akan ditaklukan dengan kekuatan militer dan ekonomi. Dengan kondisi inj, tuduhan “teroris” kerap kali merupakan refleksi dari kepentingan imperialistik ketimbang realitas objektif. Oleh sebab itu, proses deradikalisasi terorisme hanya dapat diselesaikan dengan menata ulang tatanan dunia yang berjalan lebih adil, ketika kekayaan tidak berpusat dalam genggamannya segelintir negara atau kekuatan militer tidak dipakai sebagai alat dominasi politik.

E. Menyiapkan Model Keamanan yang berbasis Hak Asasi

Keamanan tidak boleh terdefiniskan sebagai monopoli negara. Sistem yang dipakai saat ini mengontrol maona keamanan sebagai absennya ancaman kepada negara itu sendiri, namun tidak memandang aspek terpenuhinya hak-hak dasar warga. Paradigma kognitif ini harus berubah. Dibandingkan membangun negara menggunakan anggaran militer yang membengkak, solusi visioner yang efektif adalah berinvestasi dalam pendidikan, kesejahteraan sosial dan distribusi ekonomi. Sangat jarang ada yang menjadi ekstremis karena menggemari satu buku atau mendengar ceramah, namun sangat banyak yang berubah menjadi ekstremis dikala hilangnya harapan karena ketidakadilan sistemik.

Harapan harus dibuat menarik ketimbang kebencian.

Dengan begitu, memaknai terorisme bukan hanya terbelenggu tentang siapa pelakunya, namun melacak struktur kekuasaan yang mengorganisir kondisi bagi kekerasan untuk tumbuh. Negara yang kerap mengklaim keberadaanya sebagai pelindung masyarakat dari terorisme, justru sering menjadi aktor utama yang melahirkan ketakutan itu sendiri. Apabila ingin dunia terlepas dari siklus kekerasan, maka harus yang diberantas bukan hanya kelompok teroris, namun mereka yang mengerami sistem pemunculan teroris. Sehingga di titik ini, penting bagi kita untuk tidak menelan mentah narasi negara namun mampu menciptakan narasi baru yang tidak tunduk pada logika penindasan.

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Agamben, Giorgio. 1998. *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Arendt, Hannah. 1951. *The Origins of Totalitarianism*. New York: Harcourt Brace.
- Bauman, Zygmunt. 2006. *Liquid Fear*. Cambridge: Polity Press.
- Beck, Ulrich. 2002. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London: SAGE Publications.
- Benjamin, Walter. 1968. *Illuminations: Essays and Reflections*. New York: Schocken Books.
- Butler, Judith. 2004. *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Chomsky, Noam. 2001. 9-11. New York: Seven Stories Press.
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.
- Freedman, Lawrence. 2013. *Strategy: A History*. New York: Oxford University Press.
- Gray, John. 2003. *Al Qaeda and What It Means to Be Modern*. New York: The New Press.
- Habermas, Jürgen. 1984. *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Boston: Beacon Press.
- Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan*. London: Andrew Crooke.
- Huntington, Samuel P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon & Schuster.
- Kaldor, Mary. 1999. *New and Old Wars: Organized Violence in a Global Era*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Kepel, Gilles. 2002. *Jihad: The Trail of Political Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Klein, Naomi. 2007. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. New York: Metropolitan Books.
- Mamdani, Mahmood. 2004. *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*. New York: Pantheon Books.
- Nietzsche, Friedrich. 1887. *On the Genealogy of Morals*. Leipzig: C.G. Naumann.
- Pape, Robert A. 2005. *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. New York: Random House.
- Roy, Olivier. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.
- Said, Edward W. 1978. *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Schmitt, Carl. 1922. *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*. Munich: Duncker & Humblot.
- Schmitt, Carl. 1932. *The Concept of the Political*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt, Carl. 1950. *The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum*. Cologne: Greven Verlag.
- Schmitt, Carl. 1963. *Theory of the Partisan: Intermediate Commentary on the Concept of the Political*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt, Carl. 1956. *Hamlet or Hecuba: The Intrusion of the Time into the Play*. Düsseldorf:

Diederichs.

Schmitt, Carl. 1926. *Political Romanticism*. Munich: Duncker & Humblot.

Schmitt, Carl. 1921. *Die Diktatur*. Munich: Duncker & Humblot.

Žižek, Slavoj. 2002. *Welcome to the Desert of the Real! Five Essays on September 11 and Related Dates*. London: Verso.

Jurnal:

Abrahms, Max. 2008. "What Terrorists Really Want: Terrorist Motives and Counterterrorism Strategy." *International Security* 32 (4): 78–105.

Asad, Talal. 2007. "On Suicide Bombing." *Social Text* 25 (2): 93–108.

Barkawi, Tarak. 2004. "On the Pedagogy of 'Small Wars'." *International Affairs* 80 (1): 19–37.

Baudrillard, Jean. 2002. "The Spirit of Terrorism." *Le Monde Diplomatique*, November 2001.

Burke, Jason. 2004. "Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam." I.B. Tauris.

Nietzsche, Friedrich. 1887. *Zur Genealogie der Moral [On the Genealogy of Morality]*. Leipzig: Verlag von C.G. Naumann.

Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil*. London: Andrew Crooke.

Schmitt, Carl. 1922. *Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität [Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty]*. Munich: Duncker & Humblot.

Schmitt, Carl. 1932. *Der Begriff des Politischen [The Concept of the Political]*. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt.

Schmitt, Carl. 1950. *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum]*. Cologne: Greven Verlag.

RAND Corporation. 2003. *The Muslim World After 9/11*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2004. *Trends in Terrorism: Threats to the United States and the Future of the Terrorism Risk Insurance Act*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2006. *Beyond al-Qaeda: The Global Jihadist Movement*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2008. *Counterinsurgency in Afghanistan: RAND Counterinsurgency Study—Volume 4*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2010. *How Terrorist Groups End: Lessons for Countering al Qaeda*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2013. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2016. *Radicalization in the West: The Homegrown Threat*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2019. *Counterterrorism and Counterinsurgency in Somalia: Assessing the Campaign Against Al Shabaab*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2021. *The Future of the Islamic State's Financial Resources*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

RAND Corporation. 2022. *The Role of Social Media in the Radicalization of Youth: A Study of ISIS's Online Recruitment Campaigns*. Santa Monica, CA: RAND Corporation.

Kepel, Gilles. 2004. *The War for Muslim Minds: Islam and the West*. Cambridge, MA: Belknap Press.

Roy, Olivier. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.

Mamdani, Mahmood. 2004. *Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror*. New York: Pantheon Books.

Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley: University of California Press.

Sageman, Marc. 2004. *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Pape, Robert A. 2005. *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism*. New York:

Random House.

Khosrokhavar, Farhad. 2005. *Suicide Bombers: Allah's New Martyrs*. London: Pluto Press.

Gerges, Fawaz A. 2005. *The Far Enemy: Why Jihad Went Global*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hoffman, Bruce. 2006. *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press.

Stern, Jessica. 2003. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. New York: HarperCollins.

Burke, Jason. 2003. *Al-Qaeda: Casting a Shadow of Terror*. London: I.B. Tauris.

Benjamin, Daniel, dan Steven Simon. 2002. *The Age of Sacred Terror*. New York: Random House.

Artikel:

Schmitt, Carl. 1938. "The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes: Meaning and Failure of a Political Symbol." *The Journal of Politics* 2(4): 511-526.

Schmitt, Carl. 1940. "Thomas Hobbes als politischer Denker." *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 34(3): 343-368.

Schmitt, Carl. 1963. "Der Begriff des Politischen." *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie* 49(1): 1-33.

Schmitt, Carl. 1969. "The Concept of the Political." *Telos* 2: 9-32.

Schmitt, Carl. 1976. "The Age of Neutralizations and Depoliticizations." *Telos* 25: 130-142.